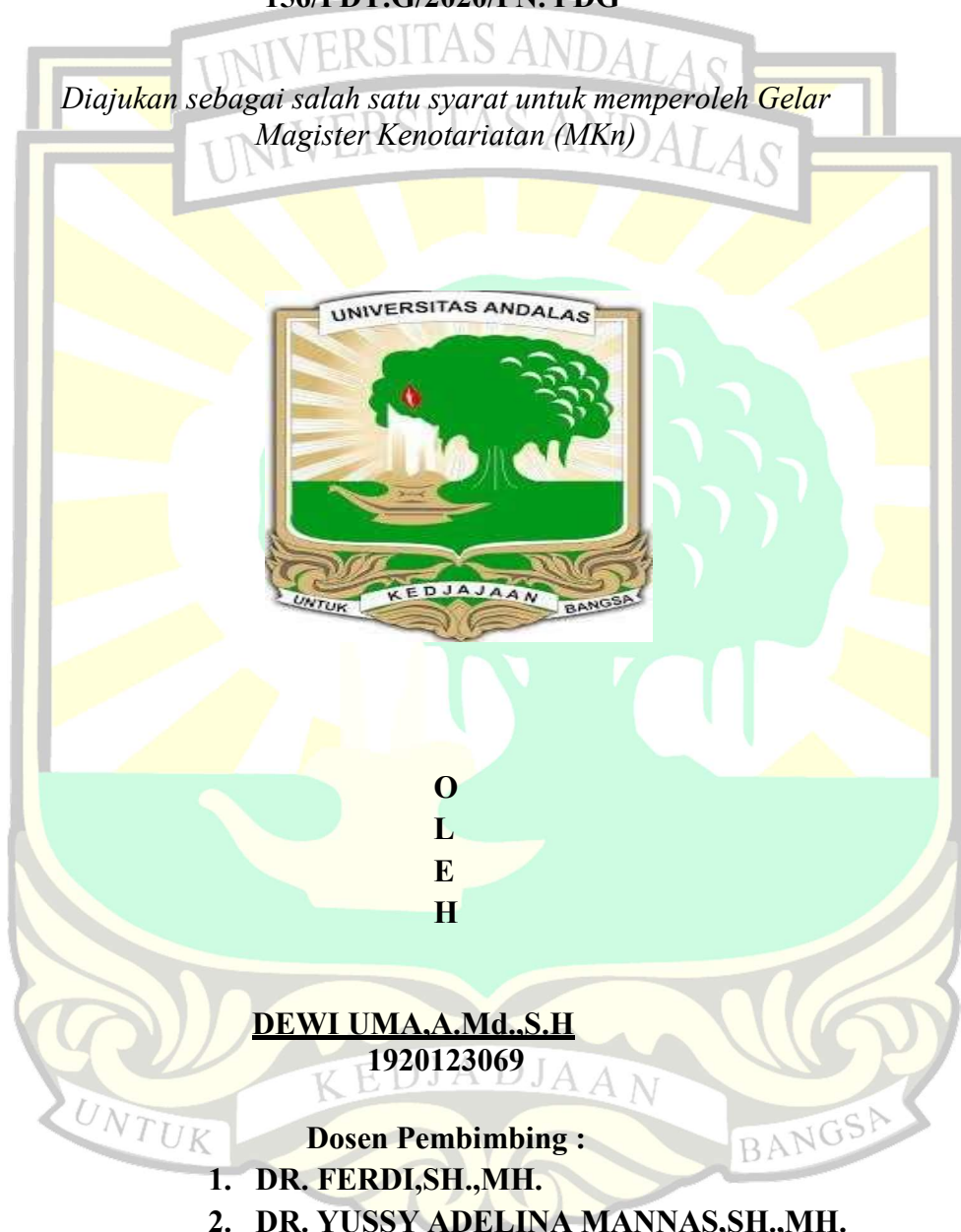


TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK ATAS
JAMINAN HUTANG PADA PT. JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR

156/PDT.G/2020/PN. PDG

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (MKn)*



O
L
E
H

DEWI UMA.A.Md..S.H

1920123069

Dosen Pembimbing :

- 1. DR. FERDI,SH.,MH.**
- 2. DR. YUSSY ADELINA MANNAS,SH.,MH.**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK TERHADAP JAMINAN HUTANGPADA PT. JAPFA COMFEED INDONESIA TBK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 156/PDT.G/2020/PN. PDG)

DEWI UM,A.Md.,SH. NIM : 1920123069

Lembaga Jaminan Hak Tanggungan ini telah diakui eksistensinya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan menjadikan kepentingan debitur maupun kreditur mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan hak tanggungan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak kreditur apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini (1) Bagaimana perlindungan terhadap hukum para pihak jaminan hutang apabila terjadi wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN. Pdg? (2) Bagaimana akibat hukum jika lelang terhadap jaminan hutang tidak melunasi hutang debitur dalam Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN. Pdg? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif, hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) Janji-Janji yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. Semua janji yang tercantum dalam Pasal ini tidak mutlak seluruhnya memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur, tetapi hanya sebagian janji saja yang sungguh memberikan perlindungan bagi kreditur apabila debitur wanprestasi. ketika debitur wanprestasi atau cidera janji. Perlindungan hukum tersebut berupa adanya janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan (debitur) untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan pemegang Hak Tanggungan (kreditur) atau janji yang harus dilakukan apabila debitur wanprestasi, (2) akibat hukum atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan yang telah diperjanjikan dimana tergugat melakukan wanprestasi dan nilai dari jaminan hutang tergugat tidak dapat memenuhi jumlah hutang tergugat maka tergugat bertanggung jawab atas sisa hutang sesuai dengan putusan hakim pada nomor 156/Pdt.G/2020/PN. Pdg sebesar Rp. 1.237.820.395,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)

Kata kunci: Jaminan Hutang, Kredit, Lelang

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF THE PARTIES AGAINST DEBT COLLATERAL ATPT. JAPFA COMFEED INDONESIA TBK BASED ON DECISION NUMBER 156/PDT.G/2020/PN. PDG)

DEWI UMA,A.Md.,SH. NIM : 1920123069

This Mortgage Guarantee Institution has been recognized for its existence through Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land and making the interests of debtors and creditors obtain legal protection from the government. In the process of granting credit, it often happens that the creditor is harmed when the debtor defaults, so a legal rule is needed in the implementation of the imposition of mortgage rights contained in a credit agreement, which aims to provide legal certainty and protection for related parties, especially for creditors. creditor if the debtor defaults or does not fulfill his obligations. The problems discussed in this thesis are (1) How is the legal protection of the debt guarantee parties in the event of default based on Decision Number 156/Pdt.G/2020/PN. Pdg?(2)What are the legal consequences if the auction against the debt guarantee does not pay off the debtor's debt in Decision Number 156/Pdt.G/2020/PN? Rev? The method used in this research is normative research, the research results obtained are

(1) Promises listed in the Mortgage Deed. All promises in this Article do not provide legal protection to creditors, but only some of the promises actually provide protection for creditors if the debtor defaults. when the debtor defaults or defaults. The legal protection is in the form of a promise that limits the authority of the mortgage right (debtor) not to take actions that are detrimental to the mortgage holder (creditor) or promises that must be made if the debtor defaults, (2) legal consequences for a sanction in the event of an act contrary to what has been agreed upon where the defendant defaults and the value of the collateral for the defendant's debt cannot meet the amount of the defendant's debt, the defendant is responsible for the remaining debt by the judge's decision at number 156/Pdt.G /2020/PN. Pdg Rp. 1,237,820,395.- (One Billion Two Hundred Thirty-Seven MilThirty-Sevenundred Twenty Thousand Three Hundred Ninety-Five Rupiah Ninety-Five

ds: Debt Guarantee, Credit, Auction

